



Penyusunan **PETA PROSES BISNIS** Instansi Pemerintah



Adrinal, SE.,Ak, M.Si
Kepala Bidang Penyiapan Kebijakan Tata Laksana

Kondisi Rumah

Luas 1000 m²

Total penghuni 13 orang

1 istri, 7 anak, 3 prt, 1 supir

13 kamar tidur

1 ruang perpustakaan

2 ruang keluarga

13 kamar mandi

1 kolam renang



1 kolam ikan dengan puluhan jenis ikan

Taman dengan puluhan pohon dan hewan

Masalah di Rumah

Berhubungan dengan **Aset dan Layanan Pendukung**

- **Seluruh aset rumah, di mana** posisinya, bagaimana mengontrol dan memperbaiki bila ada kerusakan
- Bagaimana **memilih pembelian aset** baru
- Apakah bentuk rumah, besar kamar, cukup untuk **mendukung kehidupan**
- **Dokumen** yang diproduksi seluruh penghuni

Berhubungan dengan **Kegiatan**

- **Kegiatan sehari-hari**, kebiasaan masing-masing penghuni rumah, dan bagaimana tahapan penyelesaian masalah
- Bagaimana proses mengurus **kolam renang**, membersihkan **kamar tidur, kamar mandi, ruang tengah**

Berhubungan dengan **Pengontrolan dan Pengukuran Kinerja**

- Bagaimana **mengukur kinerja** staf di rumah dan anak-anak
- Bagaimana **aset dan kegiatan mendukung prestasi** anak

Rumah



=

Kantor



Kondisi di Organisasi

Ribuan pegawai dan puluhan unit kerja yang sering tidak termonitor dengan baik

Proses bisnis yang kompleks

Infrastruktur dan aset teknologi informasi tidak terkendali

Tingkat rotasi pegawai yang tinggi

Staff dan pimpinan baru perlu waktu untuk memahami kondisi organisasi

Pengelolaan layanan berbasis teknologi informasi yang tidak sistematis



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN



JASA RAHARJA



RISTEKDIKTI



LIPI



KRAKATAU STEEL



KOMPAS GRAMEDIA

Masalah di Organisasi

Berhubungan dengan Aset dan Layanan Pendukung

- Seluruh aset organisasi, di mana posisinya, bagaimana mengontrol dan memperbaiki bila ada kerusakan
- Bagaimana memilih pembelian aset baru
- Apakah arsitektur organisasi, pembagian divisi, cukup untuk mendukung proses bisnis organisasi
- Dokumen yang diproduksi seluruh staf

Berhubungan dengan Kegiatan

- Kegiatan sehari-hari, kebiasaan masing-masing staf, dan bagaimana tahapan penyelesaian masalah
- Bagaimana proses pengajuan cuti, pelaksanaan pekerjaan, pengunduran diri, dsb

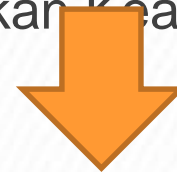
Berhubungan dengan Pengontrolan dan Pengukuran Kinerja

- Bagaimana mengukur kinerja staf dan organisasi
- Bagaimana aset dan kegiatan mendukung layanan yang disediakan organisasi

Kita Perlu **Arsitektur Organisasi**

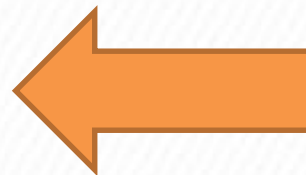


- Visi dan Misi Organisasi
- Fungsi dan Struktur Organisasi
- Roadmap Organisasi
- Proses Bisnis Organisasi
- Pengelolaan Aset dan Infrastruktur
- Pengelolaan Data, Informasi, Aplikasi
- Kebijakan Keamanan
- dsb ...



1. **Business** Architecture
2. **Data** Architecture
3. **Application** Architecture
4. **Technology** Architecture

Enterprise Architecture



Kita Perlu **Pengelolaan Kegiatan**

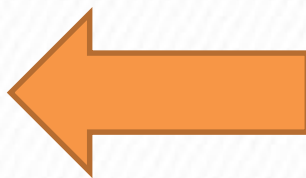


- Tahapan melakukan kegiatan
- Analisis dari suatu kegiatan
- Dokumen apa saja yang dihasilkan
- Bagaimana memonitor hasil pekerjaan
- Bagaimana cara mengukur hasil pekerjaan
- Software apa saja yang digunakan
- dsb ...



1. Initiation
2. Planning
3. Executing
4. Monitoring and Controlling
5. Closing

Project
Management



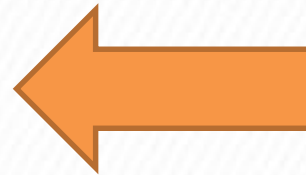
Kita Perlu **Pengelolaan Layanan**



- Bagaimana membangun layanan publik yang baik
- Bagaimana pengaturan service level agreement
- Bagaimana bila ada masalah
- Bagaimana mengelola pengetahuan
- Bagaimana pengaturan pelaporan berkala
- dsb ...



Service Management



1. Service **Strategy**
2. Service **Design**
3. Service **Operation**
4. Service **Transition**

Kita Perlu **Monitoring dan Evaluasi**

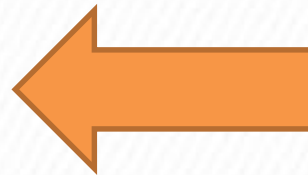


Monitoring and Evaluation

- Kapan kinerja bisa diukur
- Parameter apa saja untuk mengukur kinerja
- Apa alat ukur yang bisa digunakan
- Bagaimana menilai tingkat kematangan dari kinerja
- Siapa yang berhak mengukur
- Siapa yang berhak menjawab kuesioner pengukuran



1. **Planning** and Organization
2. Acquisition and **Implementation**
3. **Delivery** and Service
4. **Monitoring**





Visi

Menjadi Pengelola Hubungan Fiskal Pusat dan Daerah Berkelas Dunia yang Adil dan Transparan

Misi

Mewujudkan perumusan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif

Menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah yang akurat, transparan, dan tepat waktu

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Sekretariat Direktorat Jenderal

Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal

Bagian Umum, Kehumasan, dan Bantuan Hukum

Bagian Sumber Daya Manusia

Direktorat Dana Perimbangan

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan

Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah

Subdirektorat Dana Bagi Hasil

Subdirektorat Sinkronisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Subdirektorat Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah

Subdirektorat Evaluasi Keuangan Daerah

Subdirektorat Dana Alokasi Umum

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah

Subdirektorat Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Subdirektorat Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Kawasan

Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik I

Subdirektorat Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah

Subdirektorat Pelaksanaan Transfer

Subdirektorat Data Keuangan Daerah

Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik II

Subdirektorat Bimbingan Teknis Keuangan Daerah

Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah

Subdirektorat Data Non Keuangan Daerah

Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Subdirektorat Perumusan Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Subdirektorat Perumusan Kebijakan Non Dana Perimbangan

Subdirektorat Teknologi Informasi

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional

**MANAGEMENT
FUNCTION**

**Pengelolaan
Kinerja**

**Kepatuhan
Internal**

**Pengelolaan
Risiko**

**PRIMARY
FUNCTION**

Perumusan Kebijakan HKPD

**Penganggaran dan Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah, Dana
Desa, dan Hibah Daerah**

**Pelaksanaan dan Penatausahaan Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan
Hibah Daerah**

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan HKPD

Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah

**SUPPORT
FUNCTION**

**Pelayanan
Umum,
Kehumasan
dan Bantuan
Hukum**

**Pelayanan
Sumber
Daya
Manusia**

**Pelayanan
Organisasi
dan Tata
Laksana**

**Pelayanan
Teknologi
Informasi**

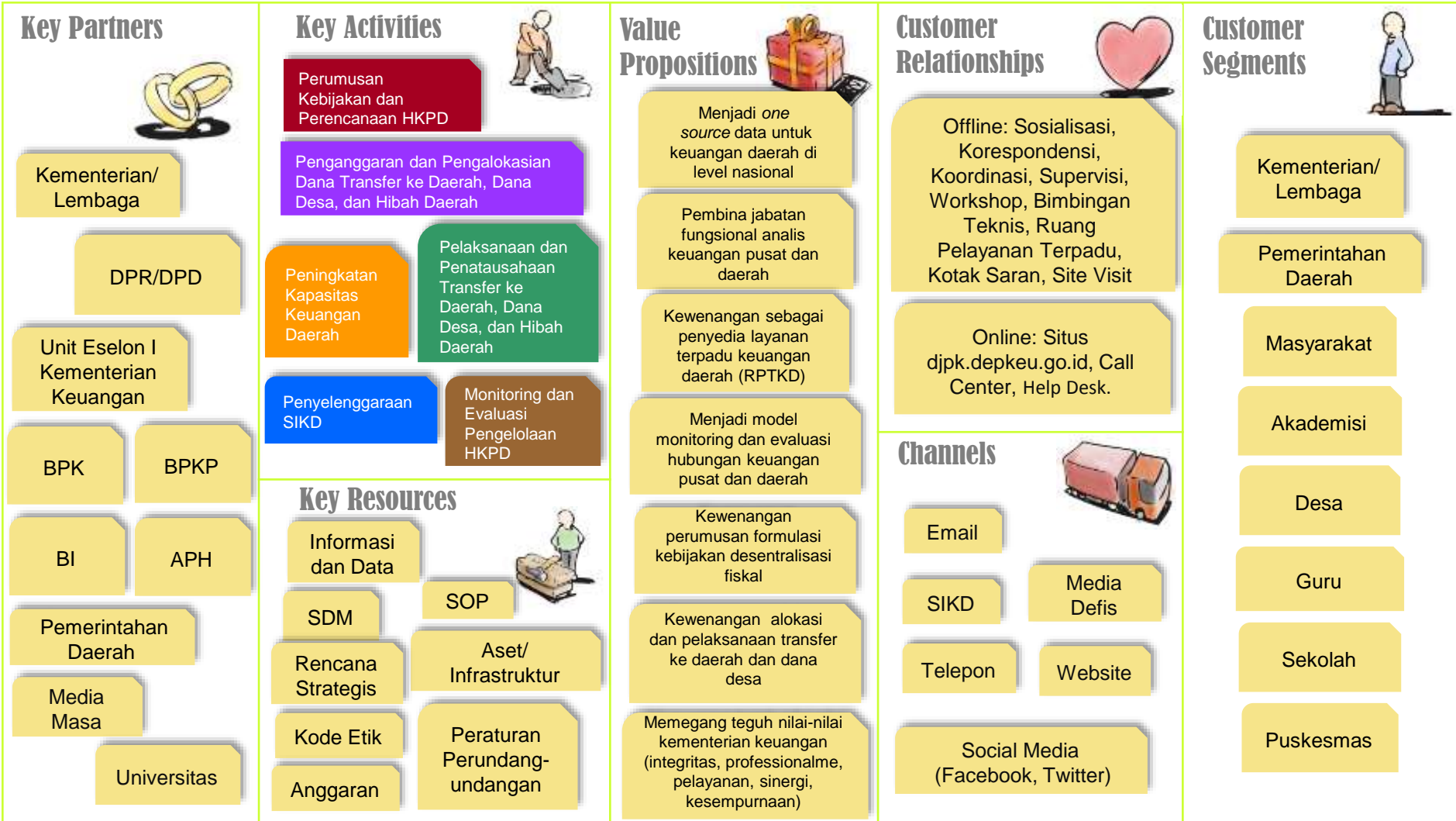
**Pelayanan
Perencanaan
dan Keuangan**

pengelola Fiskal Pusat Daerah

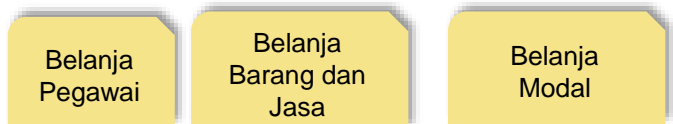
Adil dan Transparan

Business Model Canvas

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan



Cost Structure

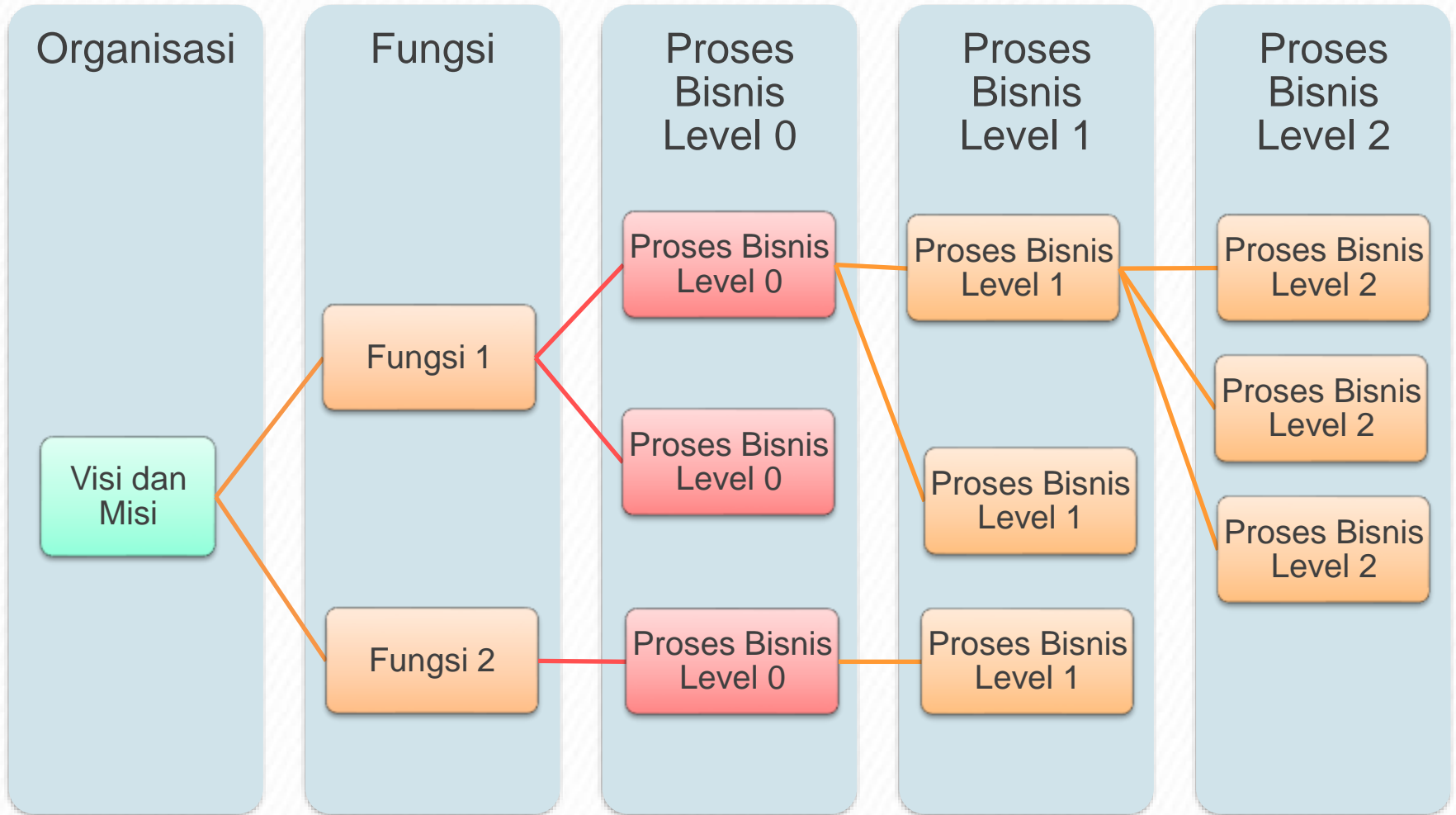


Revenue Streams



	Management	Perumusan Kebijakan HKPD	Penganggaran dan Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan Hibah Daerah	Pelaksanaan dan Penatausahaan Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan Hibah Daerah	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat Daerah (HKPD)	Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah	Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Support
Management		<ul style="list-style-type: none"> Meminta Usulan Kontrak Kinerja Menyampaikan Laporan Mitigasi Risiko Meminta Usulan Profile Risiko Menindaklanjuti Hasil Audit 	<ul style="list-style-type: none"> Meminta Usulan Kontrak Kinerja Menyampaikan Laporan Mitigasi Risiko Meminta Usulan Profile Risiko Menindaklanjuti Hasil Audit 	<ul style="list-style-type: none"> Meminta Usulan Kontrak Kinerja Menyampaikan Laporan Mitigasi Risiko Meminta Usulan Profile Risiko Menindaklanjuti Hasil Audit 	<ul style="list-style-type: none"> Meminta Usulan Kontrak Kinerja Menyampaikan Laporan Mitigasi Risiko Meminta Usulan Profile Risiko Menindaklanjuti Hasil Audit 	<ul style="list-style-type: none"> Meminta Usulan Kontrak Kinerja Menyampaikan Laporan Mitigasi Risiko Meminta Usulan Profile Risiko Menindaklanjuti Hasil Audit 	<ul style="list-style-type: none"> Meminta Pengembangan Aplikasi dan Data Meminta Usulan Kontrak Kinerja Menyampaikan Laporan Mitigasi Risiko Meminta Usulan Profile Risiko Menindaklanjuti Hasil Audit 	<ul style="list-style-type: none"> Meminta Rekrutmen SDM Mengajukan Anggaran Kegiatan Meminta Pengadaan Barang/Jasa Mengajukan Legal Drafting Mengajukan Prosedur dan Metode Kerja/SOP Mengajukan Addendum Kontrak Kinerja Menyampaikan Laporan Mitigasi Risiko Menindaklanjuti Hasil Audit Menyampaikan Usulan SOP
Perumusan Kebijakan HKPD	<ul style="list-style-type: none"> Melaporkan Pengaduan Pelanggaran Mengajukan Usulan Naskah Dinas Direktorat Jenderal PK Mengajukan Usulan Peraturan/Rancangan Peraturan 		Menyampaikan Lampiran Peraturan Presiden dan/atau PMK terkait alokasi Dana Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan Hibah Daerah		Menerima Hasil Movev		Meminta Pengembangan Aplikasi dan Data	<ul style="list-style-type: none"> Meminta Rekrutmen SDM Mengajukan Anggaran Kegiatan Meminta Pengadaan Barang/Jasa Mengajukan Legal Drafting Mengajukan Prosedur dan Metode Kerja/SOP Mengajukan Addendum Kontrak Kinerja Menyampaikan Usulan SOP
Penganggaran dan Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan Hibah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Melaporkan Pengaduan Pelanggaran Mengajukan Usulan Naskah Dinas Direktorat Jenderal PK Mengajukan Usulan Peraturan/Rancangan Peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> Meminta Perumusan Kebijakan HKPD Meminta Finalisasi Lampiran Peraturan Presiden dan/atau PMK terkait alokasi Dana Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan Hibah Daerah 					<ul style="list-style-type: none"> Meminta Pengembangan Aplikasi dan Data Meminta Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Meminta Rekrutmen SDM Mengajukan Anggaran Kegiatan Meminta Pengadaan Barang/Jasa Mengajukan Legal Drafting Mengajukan Prosedur dan Metode Kerja/SOP Mengajukan Addendum Kontrak Kinerja Menyampaikan Usulan SOP
Pelaksanaan dan Penatausahaan Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan Hibah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Melaporkan Pengaduan Pelanggaran Mengajukan Usulan Naskah Dinas Direktorat Jenderal PK Mengajukan Usulan Peraturan/Rancangan Peraturan 	Meminta Perumusan Kebijakan HKPD					<ul style="list-style-type: none"> Meminta Pengembangan Aplikasi dan Data Meminta Data Non Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Meminta Rekrutmen SDM Mengajukan Anggaran Kegiatan Meminta Pengadaan Barang/Jasa Mengajukan Legal Drafting Mengajukan Prosedur dan Metode Kerja/SOP Mengajukan Addendum Kontrak Kinerja Menyampaikan Usulan SOP
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat Daerah (HKPD)	<ul style="list-style-type: none"> Melaporkan Pengaduan Pelanggaran Mengajukan Usulan Naskah Dinas Direktorat Jenderal PK Mengajukan Usulan Peraturan/Rancangan Peraturan 	Meminta Perumusan Kebijakan HKPD		Menyampaikan Rekomendasi Penyaluran			Meminta Pengembangan Aplikasi dan Data	<ul style="list-style-type: none"> Meminta Rekrutmen SDM Mengajukan Anggaran Kegiatan Meminta Pengadaan Barang/Jasa Mengajukan Legal Drafting Mengajukan Prosedur dan Metode Kerja/SOP Mengajukan Addendum Kontrak Kinerja Menyampaikan Usulan SOP
Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Melaporkan Pengaduan Pelanggaran Mengajukan Usulan Naskah Dinas Direktorat Jenderal PK 	Meminta Perumusan Kebijakan HKPD					Meminta Pengembangan Aplikasi dan Data	<ul style="list-style-type: none"> Meminta Rekrutmen SDM Mengajukan Anggaran Kegiatan Meminta Pengadaan Barang/Jasa Mengajukan Legal Drafting Mengajukan Prosedur dan Metode Kerja/SOP Mengajukan Addendum Kontrak Kinerja Menyampaikan Usulan SOP
Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Melaporkan Pengaduan Pelanggaran Mengajukan Usulan Naskah Dinas Direktorat Jenderal PK 	Meminta Perumusan Kebijakan HKPD						<ul style="list-style-type: none"> Meminta Rekrutmen SDM Mengajukan Anggaran Kegiatan Meminta Pengadaan Barang/Jasa Mengajukan Legal Drafting Mengajukan Prosedur dan Metode Kerja/SOP Mengajukan Addendum Kontrak Kinerja Menyampaikan Usulan SOP
	RIAN PANRB	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana						
Support	<ul style="list-style-type: none"> Meminta Usulan Pelanggaran Meminta Usulan IKU Mengajukan Usulan Naskah Dinas Direktorat Jenderal PK 	<ul style="list-style-type: none"> Meminta Laporan Bahan Pendukung Statistik Meminta Usulan 	<ul style="list-style-type: none"> Meminta Laporan Bahan Pendukung Statistik Meminta Usulan SOP Meminta Workplan 	<ul style="list-style-type: none"> Meminta Laporan Bahan Pendukung Statistik Meminta Usulan SOP Meminta Workplan 	<ul style="list-style-type: none"> Meminta Usulan IKU Meminta Laporan Bahan Pendukung Statistik Meminta Usulan SOP Meminta Workplan 	<ul style="list-style-type: none"> Meminta Usulan IKU Meminta Laporan Bahan Pendukung Statistik Meminta Usulan SOP 	<ul style="list-style-type: none"> Meminta Usulan IKU Meminta Pengembangan Aplikasi dan Data Meminta Laporan Bahan Pendukung Statistik 	

Peta Proses Bisnis



**MANAGEMENT
FUNCTION**

**Pengelolaan
Kinerja**

**Kepatuhan
Internal**

**Pengelolaan
Risiko**

**PRIMARY
FUNCTION**

Perumusan Kebijakan HKPD

Penganggaran dan Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan Hibah Daerah

Pelaksanaan dan Penatausahaan Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan Hibah Daerah

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan HKPD

Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah

**SUPPORT
FUNCTION**

Pelayanan Umum, Kehumasan dan Bantuan Hukum

Pelayanan Sumber Daya Manusia

Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana

Pelayanan Teknologi Informasi

Pelayanan Perencanaan dan Keuangan

pengelola Fiskal Pusat Daerah

Adil dan Transparan

Proses Bisnis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Manajemen



Pengelolaan Kinerja



Kepatuhan Internal



Pengelolaan Risiko

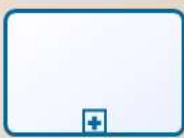
Inti



Perumusan Kebijakan Pengelolaan HKPD



Penggangan dan Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah, Dana Desa dan Hibah Daerah



Pelaksanaan dan Penatausahaan Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan Hibah Daerah



Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan HKPD



Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah



Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pendukung



Pelayanan Umum



Pelayanan Sumber Daya Manusia



Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana



Pelayanan Humas dan Kerjasama Antar Lembaga



Pelayanan Teknologi Informasi



Pelayanan Perencanaan dan Keuangan

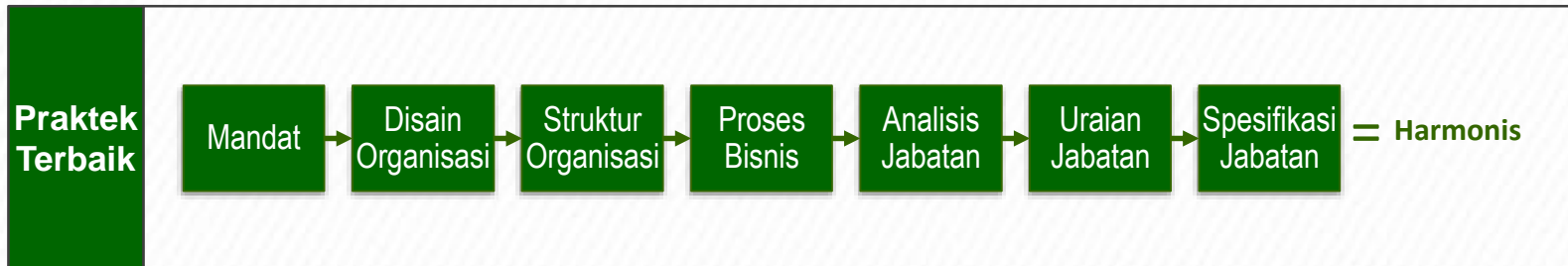


Pelayanan Bantuan Hukum

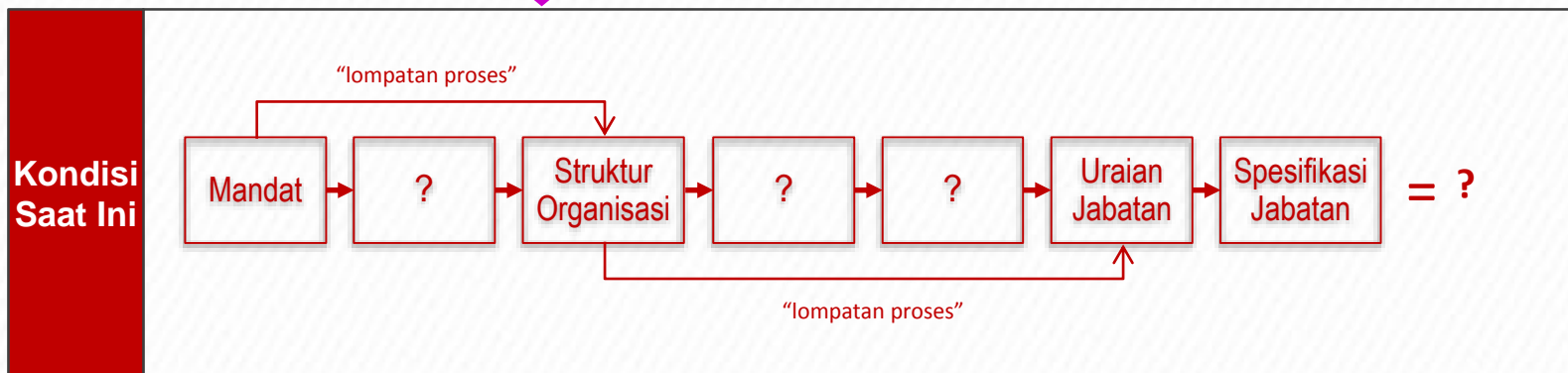
Landasan Operasional Pelaksanaan Perumusan Proses Bisnis di Kementerian



Keselarasan dan Konsistensi untuk menjaga Efektivitas Organisasi

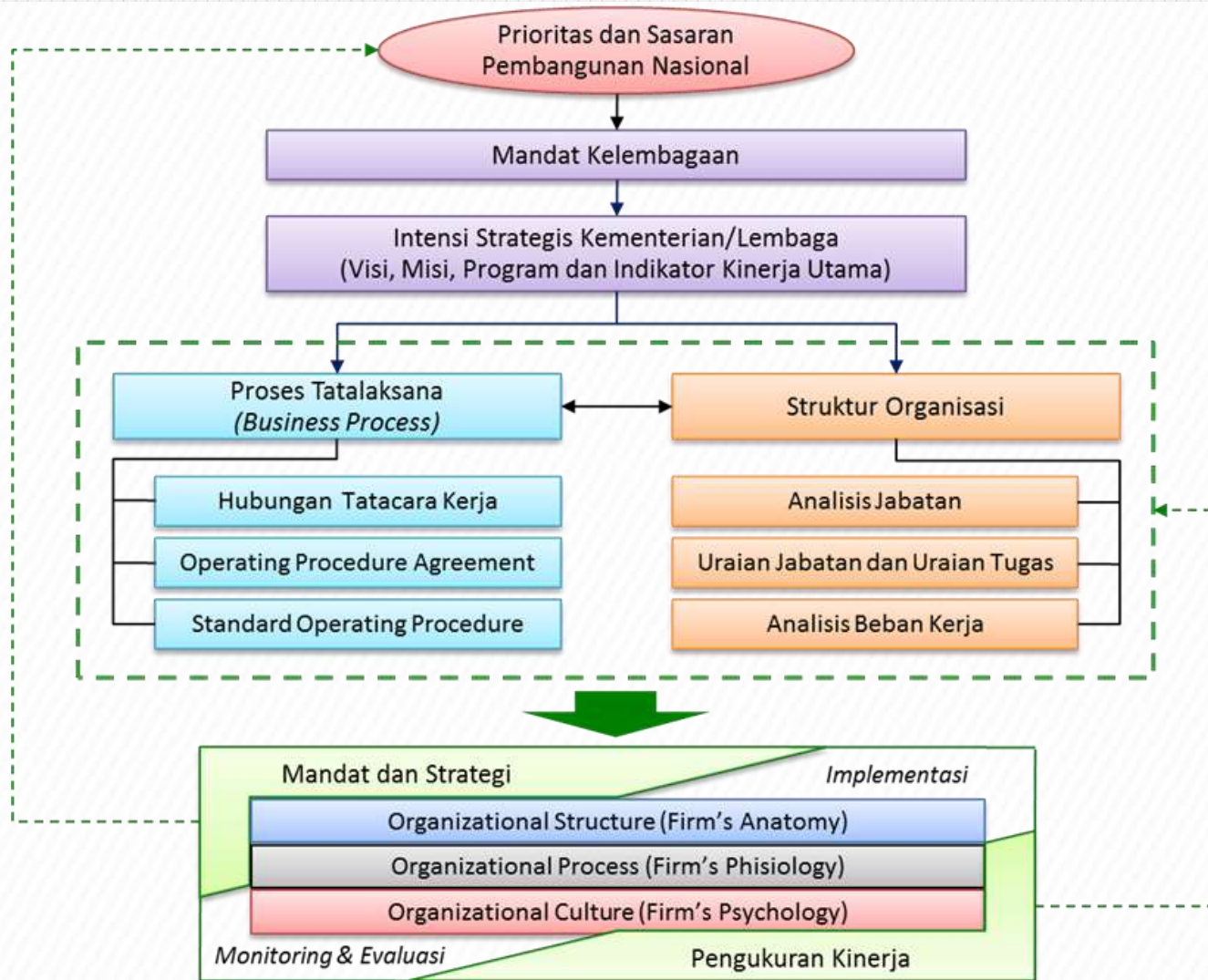


↕ Kesenjangan

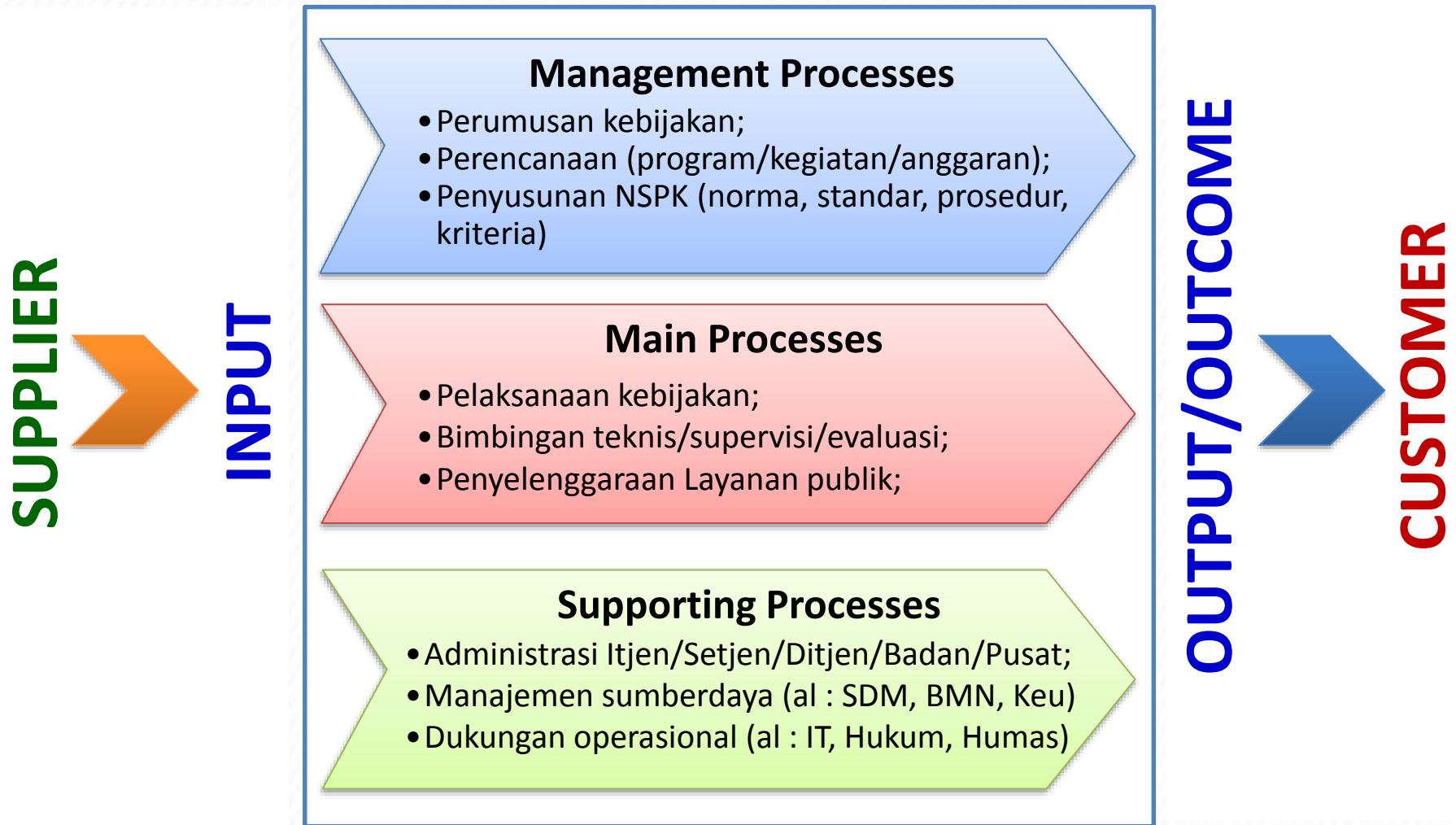


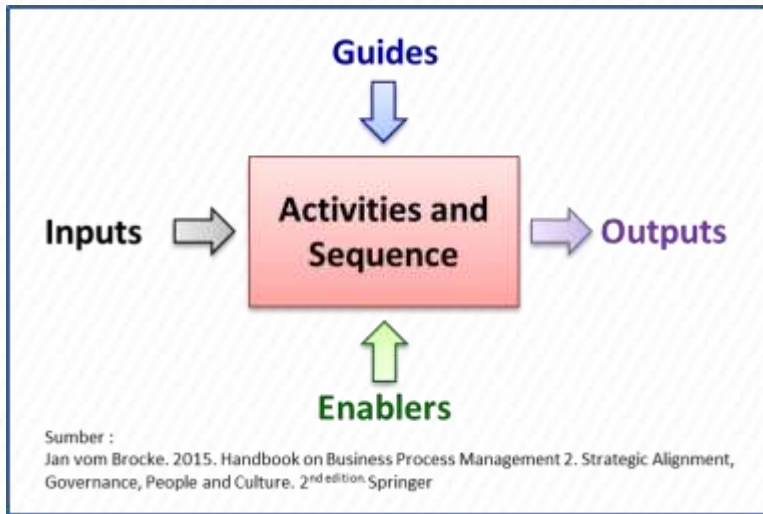
1. Adanya “lompatan proses” pada praktek yang dilakukan selama ini;
2. Tanpa melakukan pemetaan bisnis proses dan analisis jabatan terlebih dahulu, cenderung menghasilkan uraian jabatan yang “seragam”;
3. Uraian jabatan yang “seragam” akan menyulitkan dalam mengidentifikasi indikator kinerja (KPI) secara spesifik dan terukur;

Keterkaitan Proses Bisnis dalam Efektivitas Kerangka Kelembagaan

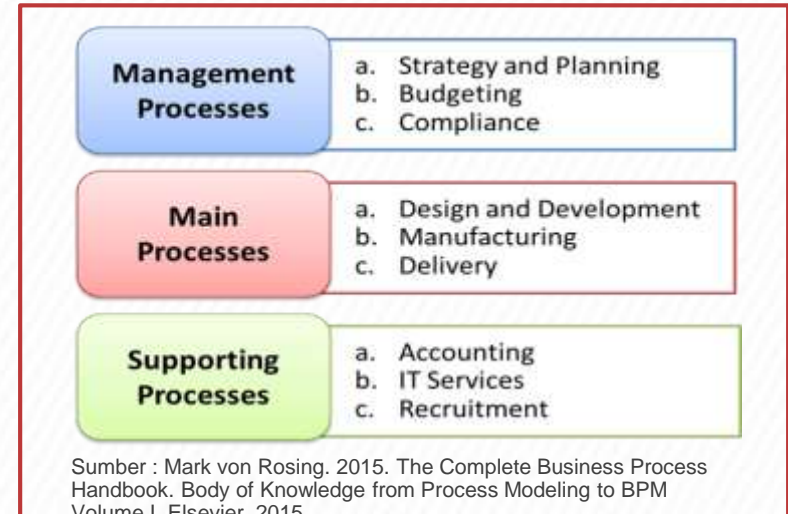


ILUSTRASI KLASIFIKASI PROSES (BIROKRASI : KEMENTERIAN DAN LEMBAGA)





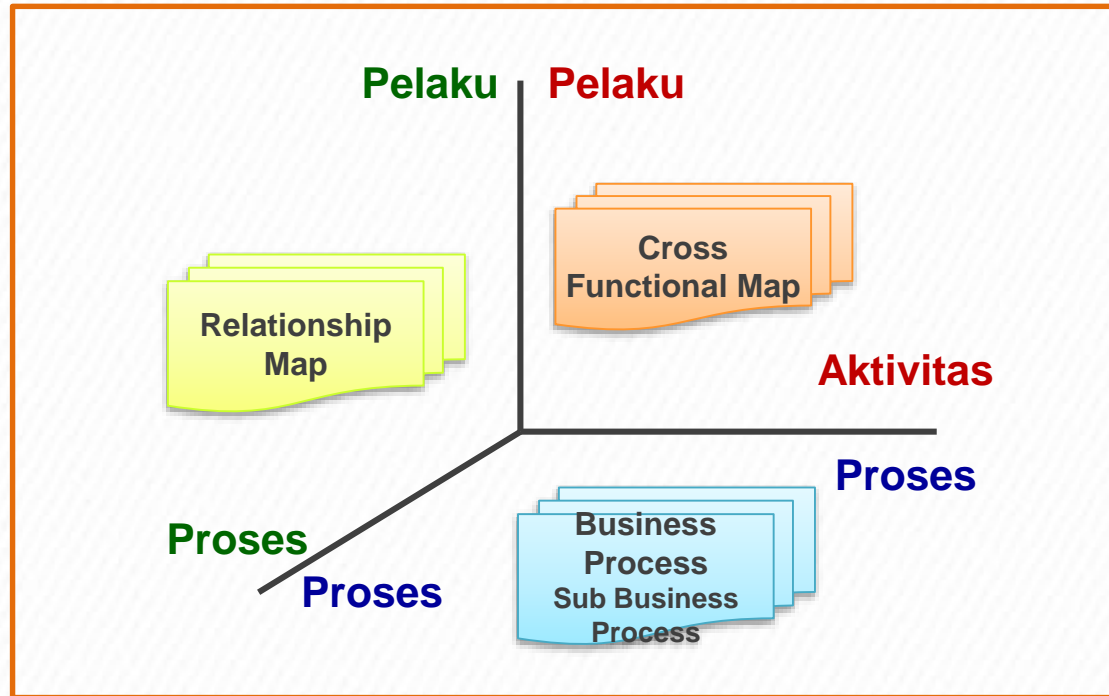
=



Dari berbagai referensi dapat diperoleh “kaidah dasar”, bahwa proses bisnis (sederhana) terbagi dalam 3 (tiga) bagian :

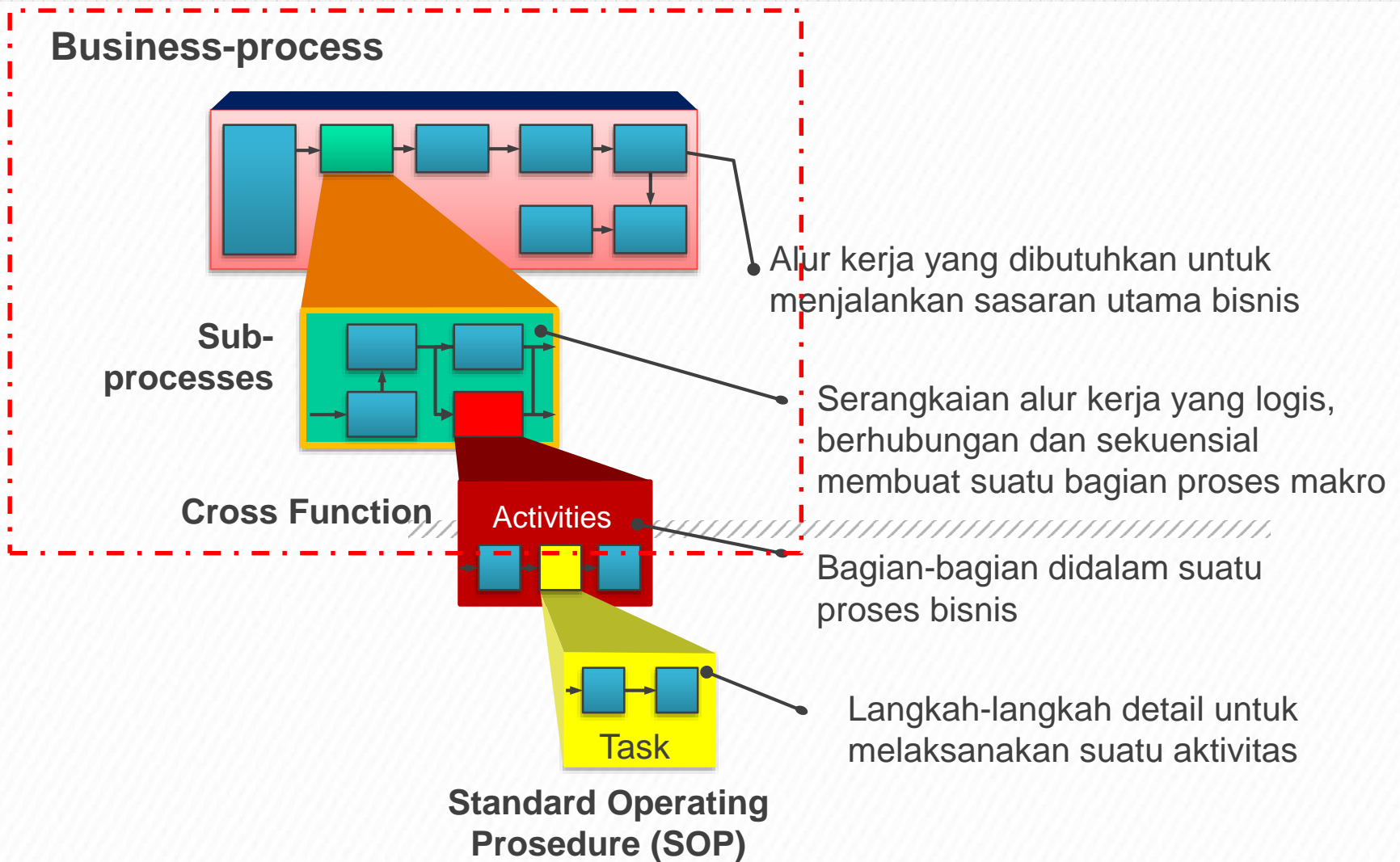
- **Management process = guides** >> menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan;
- **Main process = activities and sequence** >> pelaksanaan proses inti
- **Supporting process = enabler** >> merupakan prasyarat (pendukung) pelaksanaan proses inti;

Peta Proses dalam Ketatalaksanaan



- **Business process atau Sub-business process** : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “**Proses dengan Proses**”;
- **Cross functional map** : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “**Pelaku dengan Aktivitas**”;
- **Relationship map** : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “**Pelaku dengan Proses**”;

Kerangka Pengembangan Proses Bisnis



Definisi, Maksud Dan Tujuan

PROSES BISNIS

sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan sumber daya yang tersedia.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

aktivitas kerja yang digambarkan secara rinci, tahap demi tahap dan sistematis, rutin atau berulang-ulang

Maksud dan Tujuan

Agar setiap instansi pemerintah:

1

mampu **melaksanakan tugas dan fungsi** secara efektif dan efisien

2

mudah **mengkomunikasikan** baik kepada pihak **internal** maupun **eksternal**

3

memiliki **aset pengetahuan** yang menjadi dasar **pengambilan keputusan strategis**

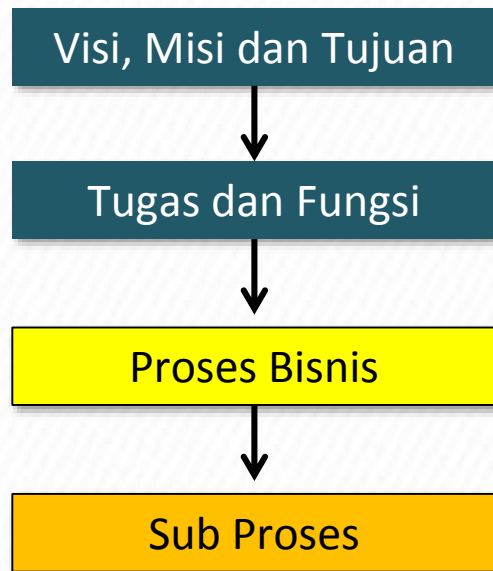
4

mudah melihat **potensi masalah dan potensi perbaikan**

5

memiliki **standar pelaksanaan pekerjaan**

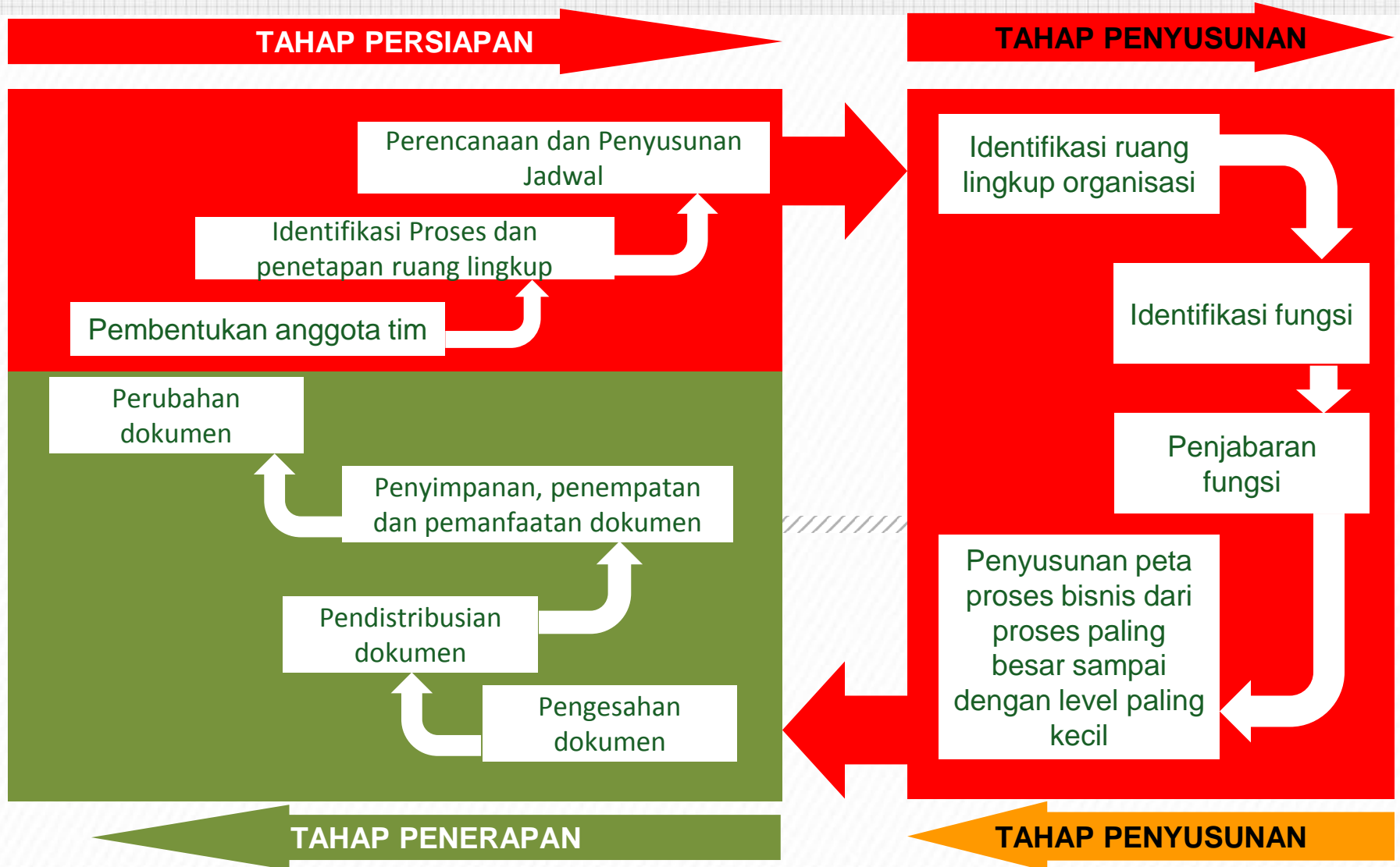
Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah merupakan keseluruhan **rangkaian alur kerja yang saling berhubungan** dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan



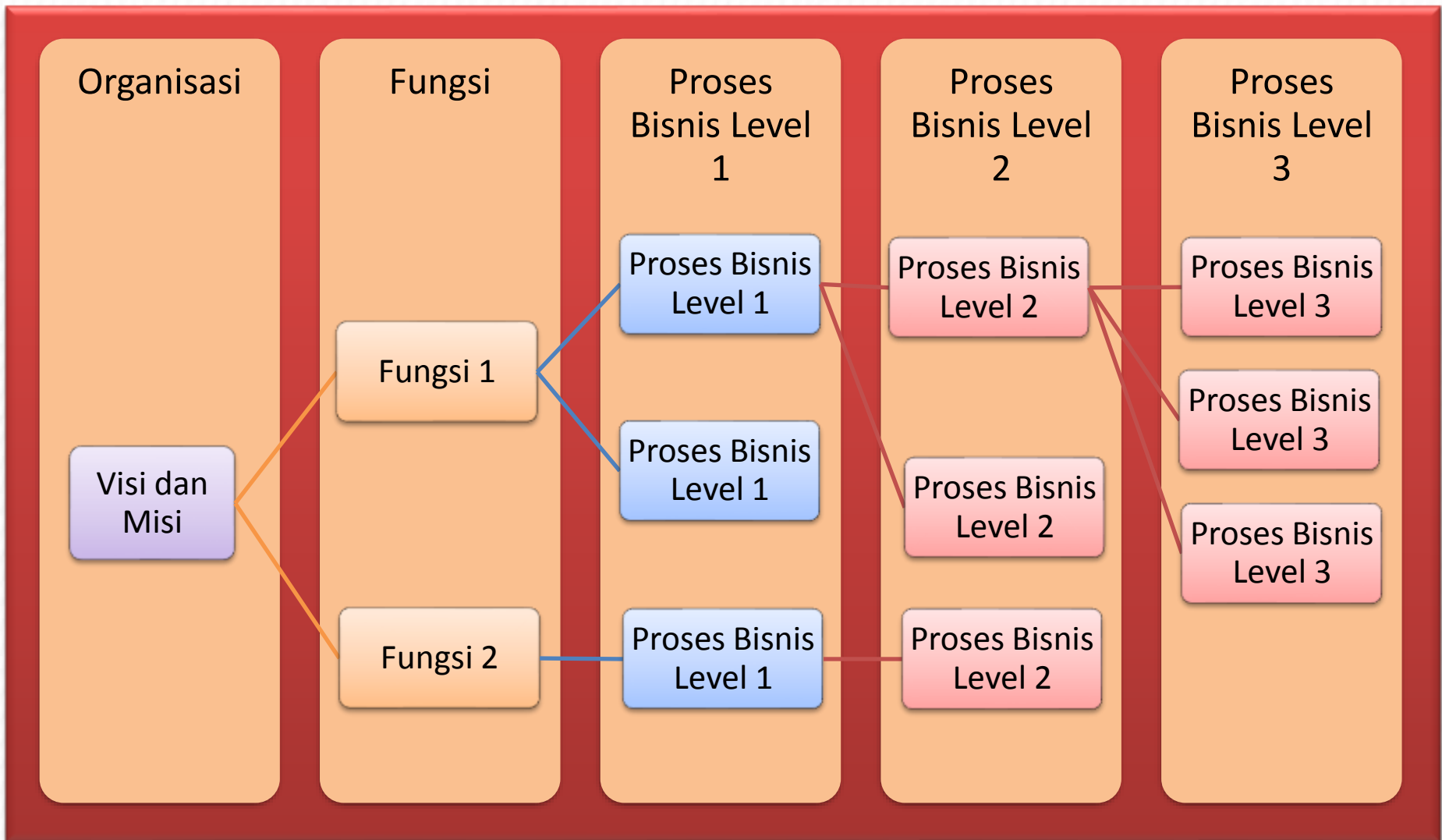
- Level 0 sampai dengan level (n)
- SOP adalah level terendah

- Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan **mandat dari visi, misi, dan tujuan**.
- Mengidentifikasi **fungsi** berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi, misi, serta tujuan.
- Setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi **beberapa proses bisnis** untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut.

Tahapan Penyusunan Peta Proses Bisnis

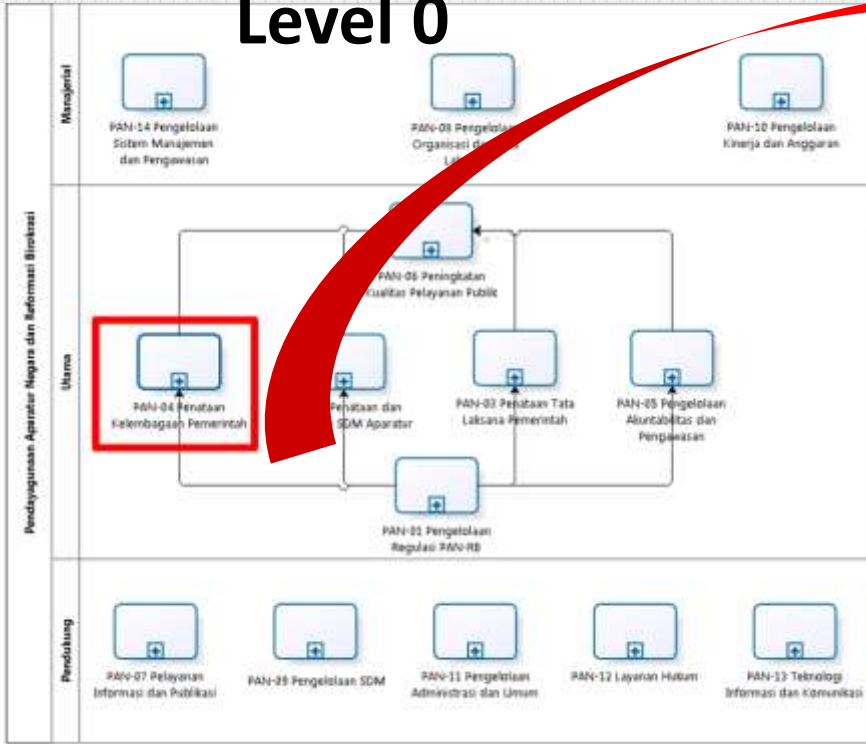


Konsep Permodelan BPMN

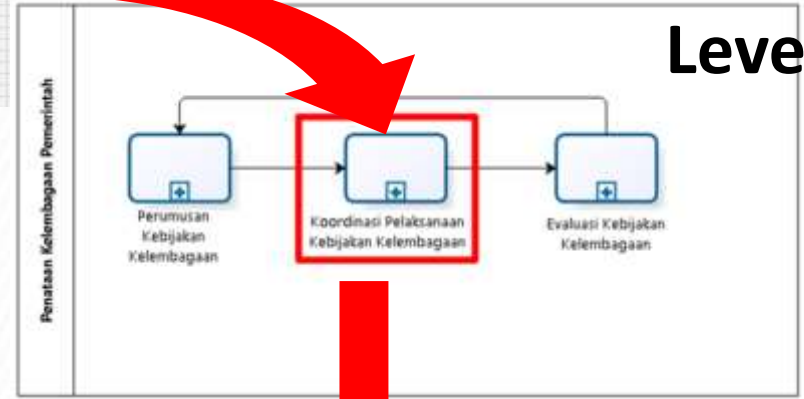


Konsep Permodelan BPMN

Level 0



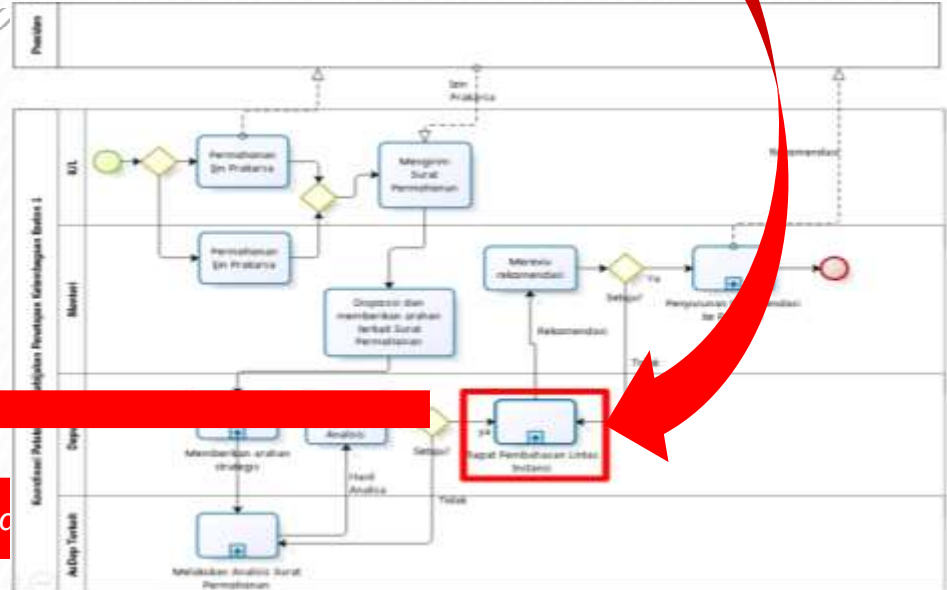
Level 1



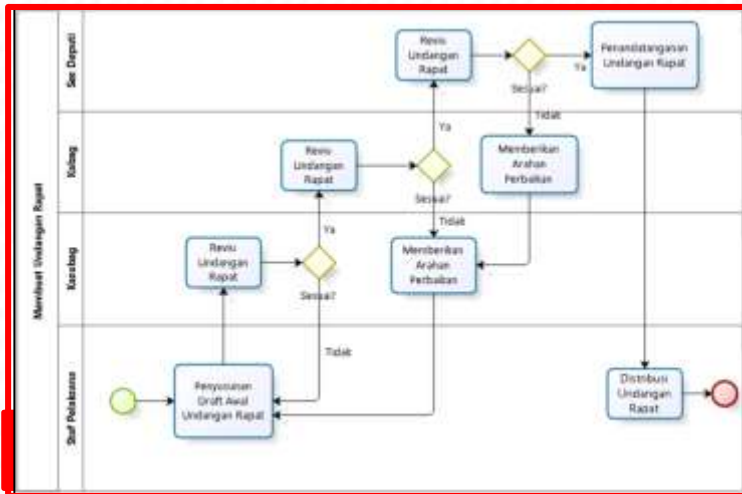
Level 2



Level 3

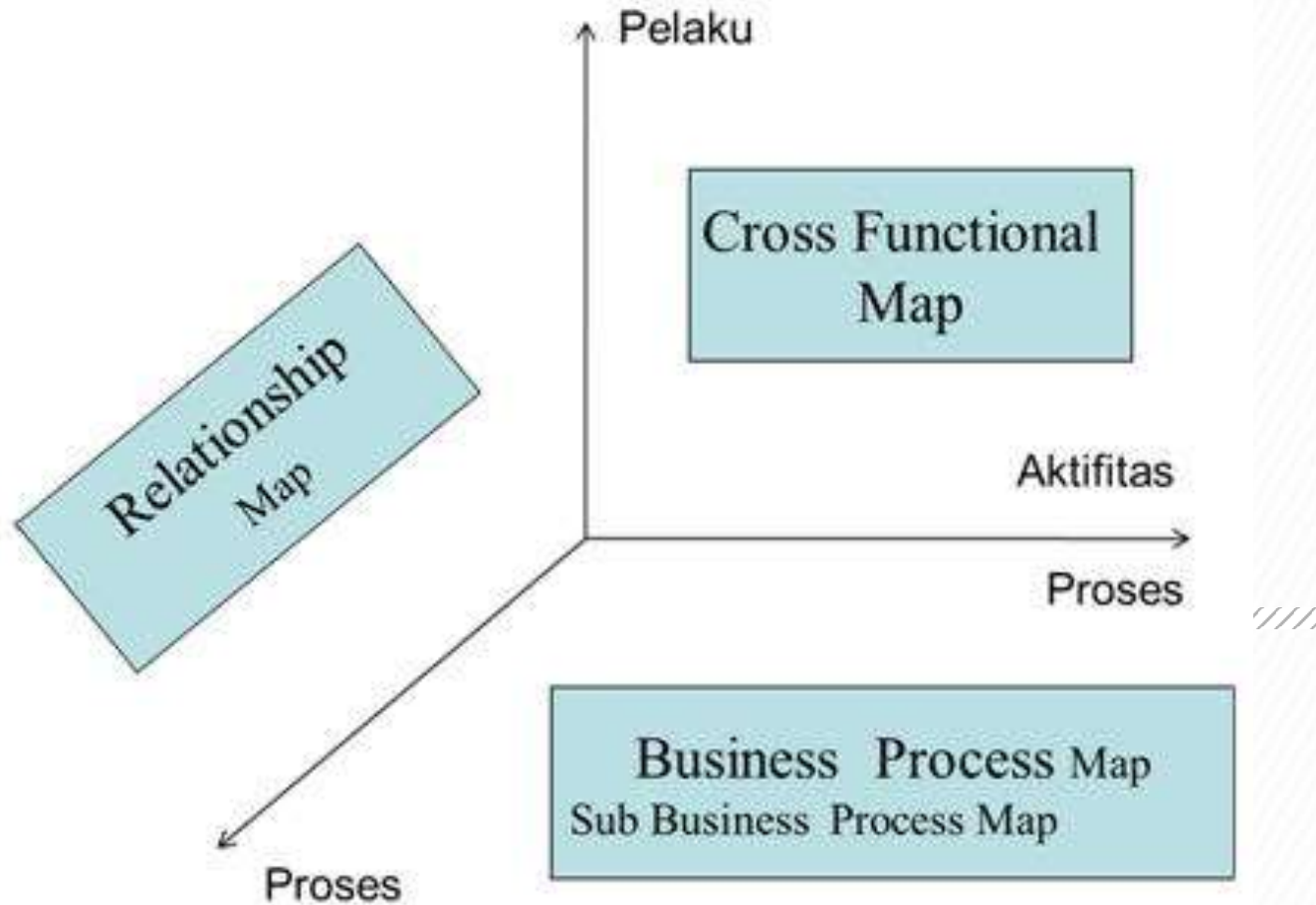


Level (n)



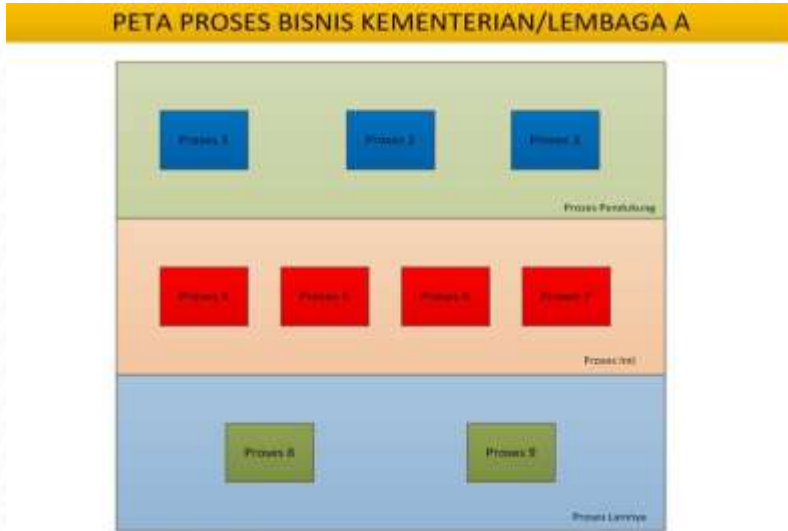
...n b a g a n d a

Konsep Permodelan Flowchart



Konsep Permodelan Flowchart

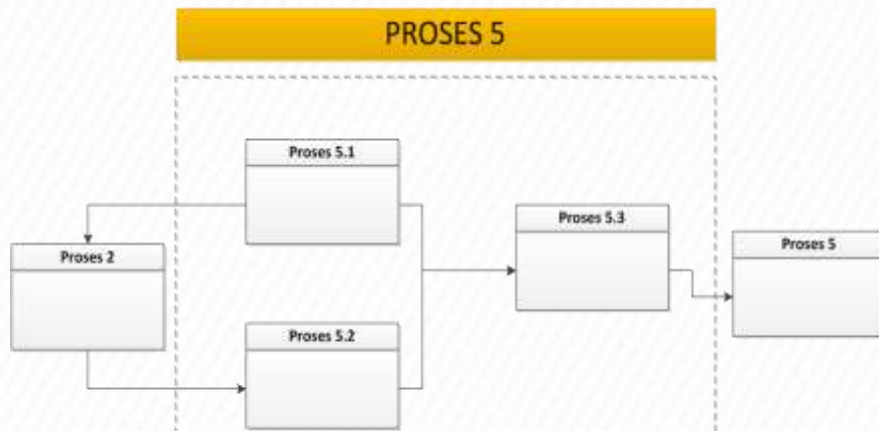
Peta proses bisnis



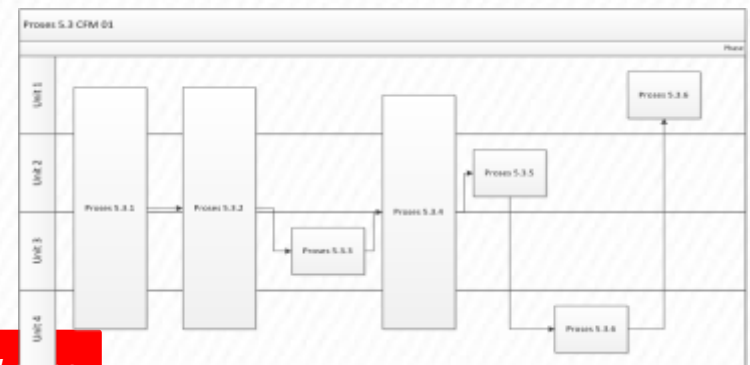
Peta relasi



Peta sub proses bisnis

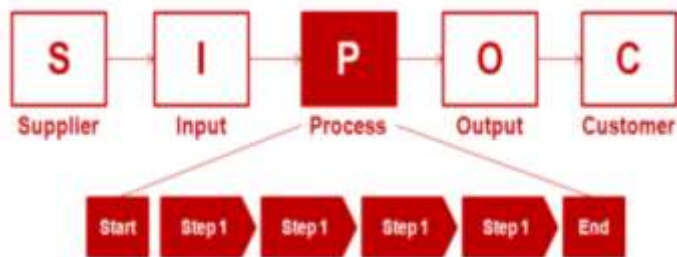


Peta lintas fungsi



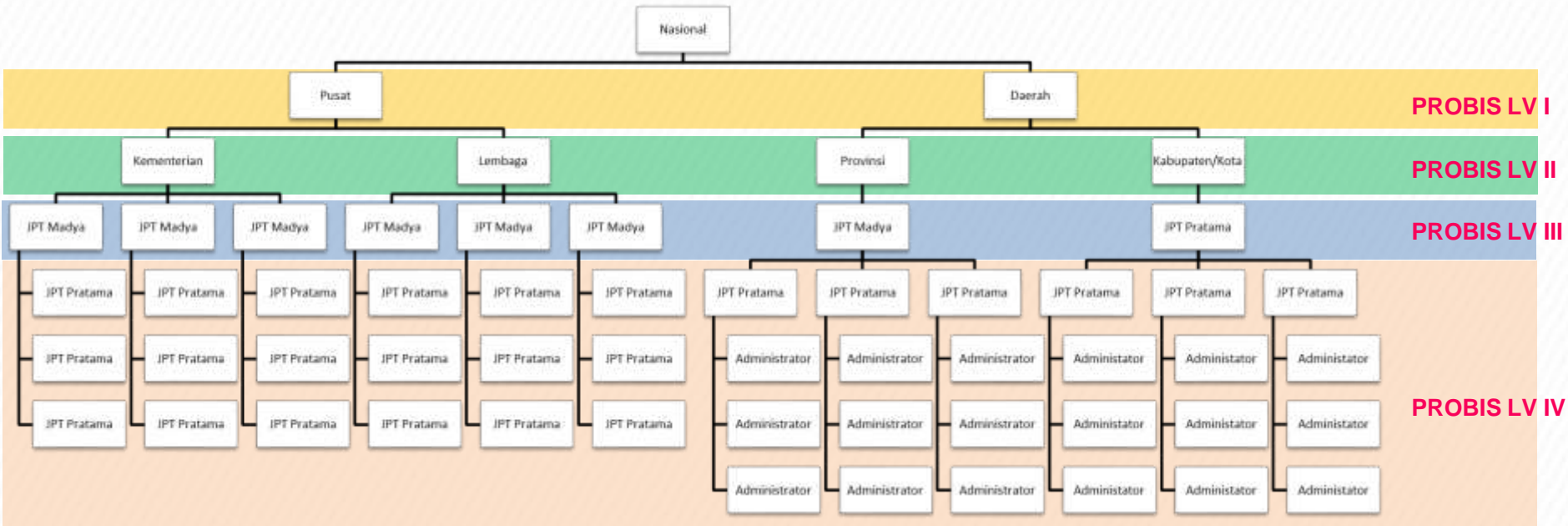
thank you!

- Peta Proses Bisnis adalah **diagram** yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
- Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah **input** menjadi **output**.

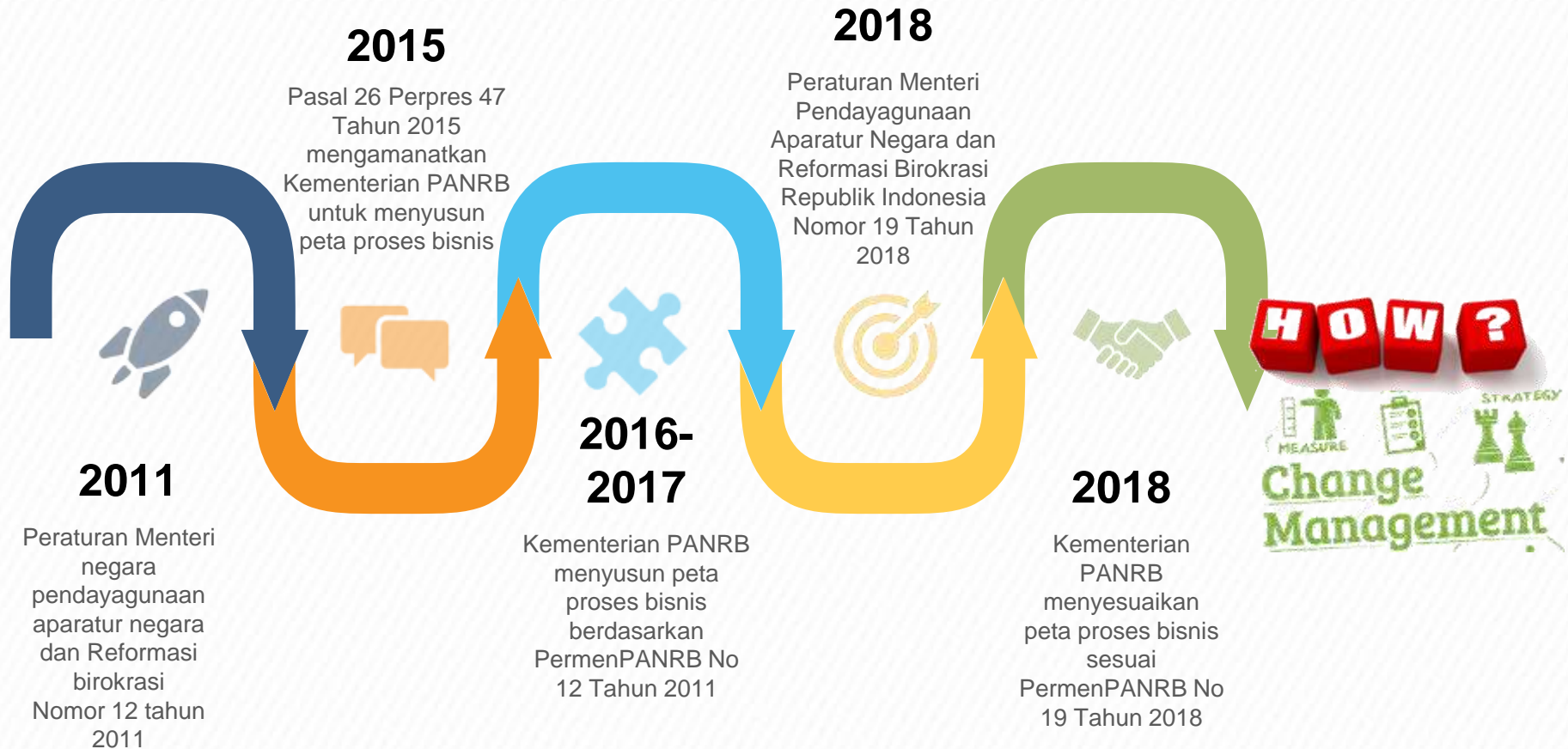


PERMENPAN 19/2018

Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan **acuan** bagi instansi pemerintah untuk **menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.**



PERUBAHAN PROSES BISNIS SESUAI PERMENPAN 12/2011 KE PERMENPAN 19/2018



Kriteria: Ketersediaan

Dimensi: Ketersediaan Peta Proses Bisnis



KRITERIA: KECUKUPAN



KRITERIA: KESESUAIAN

1

Kesesuaian Peta Proses Bisnis dengan program dan kegiatan

Seluruh Program dilaksanakan tidak berdasarkan peta proses bisnis

Sebagian kecil Program dilaksanakan berdasarkan peta proses bisnis

Sebagian besar Program dilaksanakan berdasarkan peta proses bisnis

Seluruh Program dilaksanakan berdasarkan peta proses bisnis, namun belum konsisten

Seluruh Program dilaksanakan secara konsisten berdasarkan peta proses bisnis

2

Kesesuaian Peta Bisnis Proses dengan dokumen struktur organisasi dan tata kerja (SOTK)

Seluruh (SOTK) tidak sesuai dengan peta proses bisnis

Sebagian kecil (SOTK) sesuai dengan peta proses bisnis

Sebagian besar (SOTK) sesuai dengan peta proses bisnis

Seluruh (SOTK) sesuai dengan peta proses bisnis namun belum konsisten

Seluruh (SOTK) sesuai dengan peta proses bisnis dan telah konsisten

3

Kesesuaian Peta Proses Bisnis dengan komunikasi dan koordinasi antar unit organisasi

Komunikasi dan koordinasi tidak ada hubungan dengan peta proses bisnis

Sebagian kecil komunikasi dan koordinasi sesuai dengan peta proses bisnis

Sebagian besar komunikasi dan koordinasi sesuai dengan peta proses bisnis

Seluruh komunikasi dan koordinasi seluruhnya sesuai dengan peta proses bisnis, namun belum konsisten

Seluruh komunikasi dan koordinasi terlaksana dengan baik sesuai dengan peta proses bisnis secara konsisten